

**PROSES PENANGANAN TINDAKAN PERTAMA PADA TEMPAT KEJADIAN
PERKARA (TPTKP) KECELAKAAN MENONJOL UNTUK PENYIDIKAN
KECELAKAAN LALULINTAS
(Di Wilayah Hukum Polres Probolinggo)**

Andhito Bhayu Iswara¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax (0341)552249
Email : andhito07@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is to find out the form of the first handling process at the Place of Accident Cases (TPTKP) where accidents appear for the investigation of traffic accidents in the Probolinggo area. which affects the handling of the first action at the Place of Accident Case (TPTKP) Prominent Accident For Traffic Accident Investigation. By using a sociological juridical approach to understand and approach the object of research. It is hoped that with the method researchers can find out in detail about the first handling process at the Prominent Accident Case (TPTKP) for Traffic Accident Investigations, what factors affect the first handling at the Prominent Accident Case (TPTKP) for Traffic Accident Investigations.

Keywords: *Handling First Action, crime scene, traffic accident.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas di wilayah Probolinggo. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas, faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas, faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas.

Kata Kunci : Penanganan Tindakan Pertama, tempat kejadian perkara, kecelakaan lalu lintas.

PENDAHULUAN

Permasalahan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat, karena lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana upaya dari memajukan kesejahteraan umum, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

transportasi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan bagaimana berlalu lintas yang tertib, aman dan lancar harus diwujudkan secara bersama-sama agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ataupun kematian. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu oleh semua elemen masyarakat².

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Dalam hal pengaturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat³.

Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan⁴. Selanjutnya adalah melakukan penyidikan dengan melakukan olah/penanganan tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu tempat dimana terjadinya suatu tindak pidana yang kemungkinan besar banyak fakta dan data yang dapat membantu penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut, dengan melihat apakah ada jejak dari pelaku, atau adakah keadaan yang mencurigakan dari lingkungan sekitar, seperti gerak-gerik orang yang tinggal di dekat kejadian tersebut⁵

Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) merupakan kunci keberhasilan upaya pengungkapan kasus tindak pidana termasuk dalam kasus kecelakaan, penanganan yang baik,

² M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 273.

³ Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, hal. 40

⁴ Ngatiya, Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak), 2012, Pontianak: Jurnal, hlm. 2.

⁵ Karjadi, 1981, Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Bogor: Politeia Press, hal. 36.

cepat, tepat, dan dilaksanakan secara profesional merupakan pertanda akan tercapainya keberhasilan penyidik untuk membuat jelas dan terang perkara yang dihadapi. Sebaliknya bilamana penanganan di TKP tidak dilakukan secara profesional, maka jangan berharap pengungkapan kasus dapat berjalan dengan mulus, bahkan tidak jarang menemukan jalan buntu⁶

Berbagai macam persoalan lalu lintas yang terjadi saat berlalu lintas khususnya dikota besar seperti di Kota Probolinggo bukanlah persoalan sederhana. Jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraanpun semakin tinggi. Lonjakan ini seakan tak mampu diimbangi dengan pembangunan sistem, sarana maupun prasarana lalu lintas dikota Probolinggo. Keterbatasan penyediaan fasilitas membuat kota ini menjadi padat dan semrawut, ditambah lagi ketidak tertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga membuat terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas termasuk kecelakaan lalu lintas menonjol.

Pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 dapat diketahui bahwa kecelakaan Lalu Lintas Menonjol merupakan Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan warga negara asing atau diplomat asing, Pemimpin Negara, Pejabat Negara, dan Mantan Pemimpin Negara, menyangkut anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, korban meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) orang, menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan sehingga arus lalu lintas terganggu dan/atau menjadi perhatian publik/masyarakat secara nasional.

Data mengenai jumlah atau kasus kecelakaan di wilayah Hukum Probolinggo menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 tercatat 606 orang terlibat kecelakaan di jalan raya wilayah Kabupaten Probolinggo. Dari jumlah tersebut, 65 orang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Berdasarkan data Satlantas Polres Probolinggo, sudah ada 447 kejadian laka lantas hingga awal Desember. Total ada 606 orang yang terlibat dalam kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia (MD) mencapai 65 orang. Sedangkan korban kecelakaan dengan luka berat (LB) 1 orang dan luka ringan (LR) 540 orang. Adapun data jumlah kasus kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia (MD), luka berat (LB) dan luka ringan (LR) pada bulan Januari-November 2020 dapat disajikan pada Tabel 1.1.

⁶ Mun'im Idries, 2011, ilmu Pengetahuan Kedokteran Forensik, Jakarta: Binarupa Aksara, hal. 312.

**Tabel 1.1 Kasus Kecelakaan di Wilayah Hukum Polres Probolinggo Bulan Januari-
November 2020.**

No.	Bulan	Kecelakaan Lalu Lintas			
		Kejadian	Meninggal Dunia (MD)	Luka Berat (LB)	Luka Ringan (LR)
1	Januari	54	5		68
2	Februari	47	6		60
3	Maret	43	4		3
4	April	28	7	1	29
5	Mei	54	11		58
6	Juni	43	2		58
7	Juli	47	9		48
8.	Agustus	38	9		38
9.	September	29	2		33
10.	Oktober	29	3		37
11.	November	36	7		49

Sumber: <https://www.wartabromo.com/2020/12/24/sepanjang-2020-ada-65-orang-tewas-di-jalanan-probolinggo>

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kasus atau permasalahan terkait dengan terjadinya kecelakaan di wilayah hukum Polres Probolinggo menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian sehingga upaya untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Kondisi ini menjadi hal yang harus dilakukan penanganan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara kecelakaan untuk dilakukan sehingga proses penyidikan dan penyelesaian kasus dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul : “Proses Penanganan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas (Di Wilayah Hukum Polres Probolinggo)”

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, peneliti perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : (1.) Bagaimana proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo?, (2) Apa faktor-faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo.

Tujuan penelitian yaitu untuk Untuk mengetahui proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan

Lalulintas di Wilayah Probolinggo, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo.

Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum secara umum khususnya dalam Proses Penanganan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan Lalulintas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.⁷Metode pendekatan dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol untuk penyidikan kecelakaan lalulintas.

PEMBAHASAN

A. Proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo

Polisi lalu lintas berwenang untuk melakukan penyelidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Penyelidikan ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, maka penyelidik polisi lalu lintas mendatangi tempat kejadian perkara (di wilayah Kota Probolinggo), dan mencari keterangan tentang kecelakaan tersebut. Faktor manusia dan kendaraan masih menjadi penyebab utama kecelakaan di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Hal ini tentunya menghambat kinerja polisi dalam melakukan tugas pokoknya sebagai penegak hukum.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 65.

Adapun menurut Aipda Rudi yang memberikan pernyataan mengenai Pemahaman mengenai kecelakaan menonjol untuk penyidikan kecelakaan laulintas,yaitu sebagai berikut:

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan kecelakaan menonjol adalah kecelakaan yang melibatkan pemimpin negara, diplomat , wna , tni, polri, korban meninggal dunia 5 orang, menyebabkan kemacetan berkepanjangan, atau pun menjadi perhatian nasional. Menurut Brika Fery memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

Jadi kecelakan menonjol itu sesuai dengan peraturan kepala kepolisian Negara republic Indonesia atau biasa disebut Perkap No.15 tahun 2013 adalah kecelakaan laulintas yang melibatkan warga Negara asing atau diplomat asing, pemimpin Negara, pejabat Negara, dan mantan pemimpin Negara, menyangkut anggota TNi dan anggota polri, korban meninggal dunia paling sedikit 5 orang, menyebabkan kemacetan berkepanjangan sehingga aru lalu lintas terganggu dan atau menjadi perhatian public/ masyarakat secara nasional. Dalam perkap itu sudah sangat jelas bagaimana definisi atau klasifikasi kecelakaan menonjol itu. Bagaimana prosedur dalam penanganan tindak pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol
Brika Prayudi menyatakan bahwa:

kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan kecelakaan menonjol adalah kecelakaan yang melibatkan pemimpin negara, diplomat, wna, tni, polri, korban meninggal dunia 5 orang, menyebabkan kemacetan berkepanjangan, atau pun menjadi perhatian nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang terjadi secara tidak sengaja,atau kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain secara tidak terduga dan mengakibatkan adanya korban. Adapun kecelakaan lalu lintas menonjol merupakan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga negara asing atau diplomat asing, pemimpin negara, pejabat negara, dan mantan pemimpin negara, menyangkut anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, korban meninggal dunia paling sedikit 5 (lima) orang, menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan sehingga arus lalu lintas terganggu dan/atau menjadi perhatian publik/masyarakat secara nasional. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menyatakakan bahwa penyidikan kecelakaan lalu lintas menonjol dilakukan dengan bantuan penanganan oleh satuan yang lebih tinggi serta dapat dilakukan penelitian oleh Pembina fungsi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidikan kecelakaan lalu

lintas menonjol pada kesempatan pertama wajib dilaporkan kepada Kepala Korps Lalu Lintas Polri dalam bentuk laporan dengan segera.

Adapun tanggapan Aipda Rudi mengenai manfaat apa yang diperoleh dengan adanya penanganan tindak pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol yaitu sebagai berikut:

Dalam melaksanakan TPTKP manfaat yang diperoleh adalah dapat memudahkan penyidik untuk melaksanakan olah TKP kejadian laka lantas menonjol dengan itu maka suatu perkara kecelakaan lalu lintas dengan mudah dapat mendapatkan titik terang bagai mana proses kejadian kecelakaan lalulintas. Dalam proses TPTKP selain menolong korban dahulu sebagai yang utama yaitu mengamankan barang bukti, mencari saksi-saksi, dan mengamankan tersangka agar TKP dalam status quo sehingga memudahkan penyelidikan atau pun penyidikan. Tanggapan Bripka Fery yaitu sebagai berikut:

Sebelum menuju manfaat yang diperoleh arti dari TPTKP itu kepanjangan dari Tindakan pertama di Tempat kejadian perkara yang selanjutnya di adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk segera mengamankan Korban, pelaku, saksi, barang bukti dan tempat kejadian perkara untuk menjaga TKP dalam status quo jadi ketika adanya kegiatan olah TKP nantinya ketika penyidik mengumpulkan bukti bisa mempermudah penyidik untuk membuat terang tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan bagaimana kronologis kejadian yang terjadi.

Menurut Bripka Prayudi, yaitu sebagai berikut:

Inti dari TPTKP adalah menjaga Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas tetap dalam Status quo. Jadi di Tindakan pertama pada tempat kejadian perkara disana kita melakukan serangkaian kegiatan yaitu yang pertama adalah menyelamatkan korban yang masih hidup, mengamankan barang bukti, mencari saksi-saksi dan mengamankan tersangka. Serta berusaha agar tempat kejadian perkara tidak berubah keadaannya.

Penanganan tindak pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya untuk melakukan penyelidikan sehingga dapat diketahui secara jelas dan nyata mengenai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Penanganan tersebut juga lebih dilakukan untuk melakukan penyelamatan korban kecelakaan sehingga korban dapat diberikan penanganan dengan cepat.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penanganan tindak pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol yaitu diperlukan yaitu dengan memberikan tindakan pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Selain itu manfaata dari penanganan tersebut yaitu dapat digunakan sebagai upaya untuk mengamankan tempat kejadian perkara tetap terjaga, serta melakukan pengamanan atas bukti-bukti kecelakaan yang

dapat mendukung proses penyelidikan. Selain itu manfaat yang dapat diperoleh yaitu agar sanksi kejadian dapat diperoleh secara akurat serta pelaku dapat diamankan untuk mempertanggungjawabkan yang telah terjadi pada kasus kecelakaan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2011 tentang tindakan pertama di tempat kejadian perkara, dimana Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penanganan tindak pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol, menurut Aipda Rudi yaitu sebagai berikut:

Sebagai kepolisian negara republik Indonesia tentu dasar landasan kerja adalah Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 dan sebagai dasar hukum juga menggunakan peraturan kapolri no. 5 tahun 2011 tentang Tindakan pertama di tempat kejadian perkara. SOP / 25 / III / 2013 / Lantas tentang Lakajol dan SOP / 32 / IV / 2013 / Lantas tentang TPTKP LAKA LANTAS Polres probolinggo. Bripka Fery memberikan pernyataan sebagai berikut:

Selain Perkap No. 15 Tahun 2013 Unit Satlantas Polres Probolinggo juga memiliki SOP Standar Operasional Prosedur TPTKP dan SOP Kecelakaan Menonjol untuk menangani suatu peristiwa kecelakaan menonjol. Menurut Bripka Prayudi, yaitu sebagai berikut:

Sebagai kepolisian negara republik Indonesia tentu dasar landasan kerja adalah Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 dan sebagai dasar hukum juga menggunakan peraturan kapolri no. 5 tahun 2011 tentang Tindakan pertama di tempat kejadian perkara

Penanganan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas. Kegiatan Mendatangi TKP Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Mendatangi TKP adalah tindakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas untuk segera berada di lokasi Kecelakaan Lalu Lintas guna melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan di TKP dengan mempersiapkan kendaraan dan peralatan sesuai yang ditentukan. Pemberian Pertolongan Pertama Kecelakaan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Pemberian Pertolongan Pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas dan/atau petugas medis untuk

menyelamatkan jiwa korban dengan cara memberikan perawatan medis dan/atau membawa segera korban Kecelakaan Lalu Lintas pada unit pelayanan kesehatan terdekat. Beberapa upaya atau langkah tersebut telah sesuai dengan Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 dan sebagai dasar hukum juga menggunakan Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2011 tentang Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Tujuan apa yang hendak dicapai dalam penanganan tindak pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Aipda Rudi berikut:

TPTKP bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP dan atas dasar kemanusiaan yaitu melakukan pertolongan korban PPPK dan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan status quo, penangkapan pelaku, penemuan saksi, mengamankan barang bukti dan pencarian petunjuk lainnya, agar suatu perkara kecelakaan lalu-lintas terang kejadiannya dan sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bripka Fery memberikan pernyataan mengenai tujuan apa yang hendak dicapai dalam penanganan tindak pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol

Pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas secara cepat dan tepat sehingga status quo tetap terjaga, serta meminimalkan risiko terhadap korban karena korban akan cepat tertolong. Sehingga jika TKP tetap terjaga status quo nya akan memudahkan penyidik untuk melaksanakan olah TKP dan mempermudah untuk membuat terang suatu perkara

Tanggapan Bripka Prayudi dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

TPTKP bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan status quo, penangkapan pelaku, penemuan saksi, mengamankan barang bukti dan pencarian petunjuk lainnya, agar suatu perkara kecelakaan lalu-lintas terang kejadiannya dan sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Polisi lalu lintas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Lantas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian salah satunya penyidikan kecelakaan lalu lintas guna menjaga keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas telah mengatur pelaksanaan Penanganan kecelakaan bagi kepolisian sebagai upaya untuk meminimalisir angka kecelakaan di jalan raya.

Praktik di lapangan khususnya di Polres Probolinggo Kota sendiri bisa dikatakan dimulai ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat. Kemudian akan ada beberapa petugas yang akan mendatangi tepat kejadian perkara kecelakaan untuk mengecek laporan dan melakukan olah TKP. Setelah itu pihak kepolisian akan membuat laporan dan melakukan pemeriksaan secara terperinci dan baru kemudian akan memberikan putusan bagi pihak-pihak yang telah mengalami kecelakaan untuk selanjutnya diambil tindakan. Dalam penanganan TKP ini selalu mengedepankan pelayanan bagaimana korban kecelakaan itu jiwanya tetap tertolong

Adapun proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Keceakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Laulintas dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Aipda Rudi berikut:

Penanganan Tindakan Pertama di TKP Laka Lantas adalah : Setelah mendapatkan adanya laporan kejadian kecelakaan lalu lintas saya menghubungi anggota polisi terdekat kejadian di wilayah tersebut dengan mengudarakan di HT agar ada anggota kepolisian terdekat yang datang kemudian berangkay ke TKP. Melakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK serta segera kirim ke rumah sakit terdekat; Mengamankan TKP dan mempertahankan dalam keadaan status quo; Mengatur arus lalu lintas di sekitar TKP; Memberi tanda posisi korban dan kendaraan di TKP; Mengamankan pengemudi dan awak kendaraan; Memeriksa dan mengamankan surat-surat kendaraan berupa SIM, STNK, dan surat-surat lainnya; Mencatat secara lengkap identitas korban dan saksi yang melihat kejadian tersebut; Membuat sketsa gambar TKP laka lantas; Membuat Berita Acara Penanganan TKP; dan Bila petugas telah datang, segera berikan keterangan sejelas-jelasnya dan serahkan kepada petugas penyidik dalam rangka penyidikan selanjutnya
Selanjutnya Bripka Fery memberikan pernyataan yaitu sebagai berikut:

Yang pertama kali saya lakukan sebelum melaku TPTKP adalah menyiapkan alat alat yang saya gunakan meliputi kendaraan Unit Laka Lantas, Ambulance, Derek jika dibutuhkan, Kerucut lalu lintas (*Traffic Cone*), Lampu peringatan, Lampu senter, Rambu-rambu lalu lintas dan Segitiga pengaman. Dalam Mendatangi TKP yang saya lakukan adalah: Tentukan route yang terpendek dengan memperhatikan situasi lalu lintas, Bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatan. Apabila situasi lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar menggunakan sirine dan rotator. Upayakan seminimal mungkin tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Perhatikan arus lalu lintas selama diperjalanan menuju ke TKP, bila ada kendaraan yang dicurigai melarikan diri. Adapun Setiba di TKP yang saya lakukan yaitu parkir kendaraan ditempat yang aman dan diketahui oleh pengguna jalan lainnya serta berfungsi untuk mengamankan TKP dan memberikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati. Posisi kendaraan menghadap keluar serong kanan dan berada dekat TKP apabila jalan lurus, sedang untuk TKP yang dekat dengan tikungan berada sebelum tikungan. Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai kegiatan penanganan TKP. Pembacaan keadaan di lapangan (situasi, cuaca, anatomi TKP, pengukuran) harus tepat.

Bripka Fery juga memberikan pernyataan yaitu:

Petugas Olah TKP langsung menangani TKP, mencatat dan memintai keterangan dari saksi, mengamankan barang bukti, menolong korban menuju RS / Puskesmas terdekat, mengamankan tersangka, membuat sket TKP.

Bripka Prayudi juga memberikan pernyataan yaitu:

Penanganan Tindakan Pertama di TKP Laka Lantas adalah : Setelah mendapatkan adanya laporan kejadian kecelakaan lalu lintas saya menghubungi anggota polisi terdekat kejadian di wilayah tersebut dengan mengudarakan di HT agar ada anggota kepolisian terdekat yang datang kemudian berangkat ke TKP. Melakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK serta segera kirim ke rumah sakit terdekat; Mengamankan TKP dan mempertahankan dalam keadaan status quo; Mengatur arus lalu lintas di sekitar TKP; Memberi tanda posisi korban dan kendaraan di TKP; Mengamankan pengemudi dan awak kendaraan; Memeriksa dan mengamankan surat-surat kendaraan berupa SIM, STNK, dan surat-surat lainnya; Mencatat secara lengkap identitas korban dan saksi yang melihat kejadian tersebut; Membuat sketsa gambar TKP laka lantas; Membuat Berita Acara Penanganan TKP; dan Bila petugas telah datang, segera berikan keterangan sejelas-jelasnya dan serahkan kepada petugas penyidik dalam rangka penyidikan selanjutnya

Proses penanganan terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalu lintas di Wilayah Probolinggo

Faktor yang menghambat penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Laulintas dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bripka Fery sebagai berikut:

Salah satu factor yang menghambat penanganan TPTKP di wilayah polres probolinggo adalah minimnya pemahaman masyarakat probolinggo khususnya diwilayah-wilayah pegunungan. Saya bisa berpendapat demikian karena saya sering ketika mendatangi kejadian perkara kecelakaan lalu lintas masyarakat sering menyembunyikan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Karena mereka takut. Padahal kami sebagai Polisi membantu dalam menyelesaikan proses hukum kejadian laka-lantas dengan mengutamakan dasar kemanusiaan. Karena laka-lantas bukanlah suatu kejadian kriminalitas. Karena laka-lantas adalah suatu kejadian yang tidak disengaja yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian material. Jadi Ketika kami melaksana TPTKP kami terhambat faktor tersebut. Selain itu adalah minimnya anggota kepolisian unit laka dibandingkan luas wilayahnya. Sehingga kesulitan dalam melaksanakan TPTKP.

Bripka Fery juga memberikan pernyataan yaitu:

Yang pertama Diwilayah hukum polres probolinggo memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari 21 kecamatan sehingga dari kantor unit laka menuju ke TKP sangatlah jauh membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan TKP sudah berubah. status quo dari suatu peristiwa kecelakaan tidak terjaga. Maka dari itu TPTKP sulit dilaksanakan karena barang bukti sudah berubah posisi dan juga minimnya wawawasan masyarkat tentang tetap menjaga TKP dalam status quo atau tidak berubah. Karena sering terjadi masyarakat memindahkan barang bukti. Yang kedua dengan wilayah yang sangat luas petugas unit laka hanya berjumlah 8 orang dengan setiap shift piket hanya 1 orang penyidik kepolisian sehingga menyulitkan untuk TPTKP dan Olah TKP karena minimnya personil.

Bripka Prayudi juga memberikan pernyataan yaitu:

Faktor yang menghambat penanganan TPTKP di wilayah polres probolinggo adalah dengan wilayah yang sangat luas dengan jumlah perbandingan polisi yang sedikit. Di unit laka lintas polres probolinggo hanya ada 10 Anggota dengan rincian satu Kanit laka Lantas, 8 Penyidik, dan 1 Bamin Laka Lantas. 8 pneyidik itu setiap kali piket hanya ada 1 orang saja. Jadi pelaksanaan TPTKP sulit dilaksanakan. Saya sering mendatangi TKP kejadian kecelakaan lalu lintas hanya dengan seorang diri dibantu dengan Banpol. Jadi saya kewalahan dengan penerapan SOP yang terjadi. Saya sering sekali lupa cara bertindak saya tidak sesuai SOP contohnya saya tidak menyalakan lampu rotator tidak menyala, saya lupa membawa alat komunikasi, dan sebelum saya berangkat ke TKP saya lupa tidak mengecek alat2 yang saya butuhkan.

Berdasarkan wawancara dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Laulintas di Wilayah Probolinggo dalam hal ini mengenai kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dapat

diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Dalam kasus ini rendahnya kesadaran masyarakat yaitu mislanya memidahkan barang bukti yang menjadikan penyeledikan tidak dapat berjalan dengan baik.

Faktor penghambat lainnya yaitu mengenai kurangnya personil dengan perbandingan luas wilayah Probolinggo menjadikan proses penanganan ketika terjadi kecelakaan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kurangnya jumlah personil menjadikan proses penanganan dan penyelidikan menjadikan proses penanganan dan penyeledikan menjadi terhambat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lulintas, menurut Bripka Fery yaitu sebagai berikut:

Upaya yang kami lakukan adalah sering memberikan edukasi kepada kepala desa untuk memberitahukan kepada warganya agar kooperatif dalam perkara kecelakaan lalulintas. Sehingga dapat membantu polisi untuk mempermudah melaksanakan TPTKP tugas kami penyidik melaksanakan olah TKP. Saya sudah sering memngusulakan kepada pimpinan agar menambah anggota unit laka agar lebih mepermudah pelaksanaan TPTKP.

Bripka Fery juga memberikan pernyataan yaitu:

Jadi setelah mendapat laporan kecelakaan lalulintas penyidik yang melaksanakan TPTKP akan memberikan kabar kepada Kanit Laka Lantas baha kecelakaan yang dilaporkan adalah suatu kecelakaan menonjol Kanit Akan Membetuk Regu Kecil untuk melakasakan olah TKP. Selain itu upaya untuk meningkatkan penangan TPTKP adalah meminta bantuan dari POLISI yang ada di sekitar TKP yaitu menghubungi Bhabinkamtimas, Anggota Polsek yang Piket jaga ataupun anggota yang sedang berada di TKP untuk segera mengamankan status quo dari suatu TKP laka lantas

Bripka Prayudi juga memberikan pernyataan yaitu:

Upaya yang sudah kami lakukan selama ini adalah dalam melaksanakan TPTKP kami sering mengajak Banpol yaitu bantuan polisi sebagai relawan untuk membantu kami melaksana TPTKP agar mempermudah tugas kami penyidik melaksanakan olah TKP. Kami sering memberikan edukasi kepada banpol atau relawan agar memiliki kemampuan dalam TPTKP yaitu mambantu untuk mengatur jalan, membantu mencari saksi yang mengetahui kronologis kejadian kecelakaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas maka sangat penting diperlukan adanya pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas sehingga proses penanganan dapat berjalan dengan baik dan penyelidikan dapat berjalan sesuai dengan

ketentuan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, khususnya tentang kasus terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyuluhan hukum kepada masyarakat ini merupakan salah satu tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hal ini yang sangat berperan dalam melakukan sosialisai atau penyuluhan sehingga masyarakat memiliki pemahaman tentang penanganan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu upaya yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi kepada Banpol atau relawan agar memiliki kemampuan dalam TPTKP yaitu membantu untuk mengatur jalan, membantu mencari saksi yang mengetahui kronologis kejadian kecelakaan.

KESIMPULAN

1. Proses penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo yaitu tindakan pertama yang dilakukan setelah mendapatkan laporan kejadian kecelakaan selanjutnya menghubungi anggota polisi terdekat dari terjadinya kecelakaan sehingga proses menuju ke TKP lebih cepat. Langkah berikutnya yaitu dengan memberikan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK dan korban dengan segera untuk dibawa kerumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Langkah berikutnya yaitu dengan melakukan pengamanan TKP dan mempertahankan dalam keadaan status quo, agar tidak menimbulkan kemacetan yaitu dengan mengatur arus lalu lintas di sekitar TKP dan memberi tanda posisi korban dan kendaraan di TKP. Upaya selanjutnya yaitu dengan mengamankan pengemudi dan awak kendaraan dan memeriksa dan mengamankan surat-surat kendaraan dan menunjuk sanksi kejadian kecelakaan tersebut. Menyusun sketsa gambar TKP laka lantas dan membuat berita acara penanganan TKP untuk diserahkan kepada petugas penyidik dalam rangka penyidikan yang akan dilakukan.
2. Faktor yang mempengaruhi penanganan tindakan pertama pada Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Menonjol Untuk Penyidikan Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Probolinggo yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan penanganan tindakan setelah terjadinya kecelakaan sehingga banyak terdapat perilaku masyarakat yang menghambat proses penanganan kecelakaan yang terjadi. Hambatan berikutnya yaitu kurangnya personil dari anggota kepolisian unit laka sehingga proses penyelesaian penanganan mengalami hambatan.

SARAN

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang tepat setiap terjadinya kecelakaan yang terjadi, sehingga upaya dalam melakukan proses penyelesaian terjadinya kecelakaan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat misalnya ketika masyarakat surat ijin mengemudi, sehingga masyarakat memiliki pemahaman tentang penanganan apabila terjadi kecelakaan.
2. Diharapkan secara kuantitas dilakukan penambahan jumlah anggota kepolisian unit laka sehingga dalam memberikan penanganan terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat secara maksimal dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Buku

Karjadi, 1981, Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, Bogor: Politeia Press.

M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika.

Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, Medan ,USU press.

Mun'im Idries, 2011, ilmu Pengetahuan Kedokteran Forensik, Jakarta: Binarupa Aksara.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Jurnal

Ngatiya, Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak), 2012, Pontianak: Jurnal, hlm. 2.